

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sedang berkembang dan memiliki berbagai macam masalah pembangunan yang cukup serius mulai dari masalah Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan serta masalah ekonomi lainnya yang bisa membuat negara ini menjadi terbelakang dari negara-negara lainnya. Pada negara berkembang perlunya pembangunan dalam segala bidang, selain itu Indonesia merupakan negara yang tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri adalah terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. sesuai dengan tujuan awal yang terkandung dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi hampir disemua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Pada negara maju pengangguran diakibatkan oleh pasang surutnya kegiatan ekonomi dan bisnis sedangkan pada negara berkembang pengangguran terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingginya angkatan kerja, serta kelangkaan investasi. Kurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah penduduk serta kurangnya investasi merupakan masalah pokok terjadinya pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mengakibatkan masyarakat

hidup miskin. Kondisi ini akan mengakibatkan timbulnya masalah sosial ekonomi lainnya seperti terjadinya kriminalitas, meningkatnya jumlah gelandangan serta masalah-masalah lainnya yang bisa merendahkan martabat setiap manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak paten, wewenang, kewajiban, keadilan, sebagai daerah yang otonom yang diatur oleh pemerintah untuk mengatur terhadap kepentingan masyarakat atau daerah yang telah di sesuaikan maupun diatur secara peraturan perundang-undangan. Sejak otonomi daerah berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 yang mempunyai tujuan erat untuk menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadikan daya saing di daerah tertentu. Otonomi daerah dalam keadilan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di berbagai aspek pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*) dengan baik. Pembangunan daerah tersebut bahwasanya dapat dialokasikan secara menyeluruh ke daerah, yang mana pada suatu sisi perencanaan, pembangunan daerah, serta merta dalam pendanaannya. Sehingga di daerah wilayah itu sendiri terus dibekali dengan kebijakan yang bermuatan lebih besar untuk menata rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi fiskal atau Otonomi Daerah merupakan suatu kebijakan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah mempunyai kemandirian untuk mengurus atau mengatur keuangan daerah sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat, kemudian dengan adanya kebijakan desentralisasi ini juga akan mengurangi masalah ketimpangan antar daerah serta dengan penyerahan wewenang ini bisa

meningkatkan pendapatan dimana pemerintah daerah akan lebih mengetahui dan menggali sumber-sumber yang ada didaerah tersebut. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah *Money Follows Functions*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerah dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Dalam hal ini diperlukan kondisi keuangan yang baik agar tidak terjadi pembangunan yang tidak merata antar daerah.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah jika dikelola dengan baik maka akan membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja dalam memproduksi sumber daya alam serta bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat maupun pendapatan daerah. Dalam pembangunan perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara keseluruhan agar menuju kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tentunya menurunkan Tingkat Pengangguran. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 pada halaman 4 menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Kalimantan Barat mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai 2012 yaitu 111.684 jiwa-76.010 jiwa, akan tetapi pada tahun 2013 jumlah pengangguran kembali meningkat yaitu 86.343 jiwa. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah pengangguran yang tinggi terjadi di Kabupaten Kubu Raya yaitu 17.220 jiwa-20.656 jiwa, Kota Pontianak yaitu 22.438 jiwa-15.313 jiwa, dan Kabupaten Ketapang yaitu 10.560 jiwa-9.804 jiwa.

Tabel 1.1

**Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Periode 2009-2013 (Ribu Jiwa)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Sambas	17.167	11.736	7.513	8.046	7.481
2	Kab. Bengkayang	3.961	3.364	3.686	3.563	2.540
3	Kab. Landak	7.171	7.525	5.480	7.799	5.150
4	Kab. Pontianak	10.281	8.416	3.985	5.190	5.652
5	Kab. Sanggau	7.265	7.808	7.140	2.936	1.612
6	Kab. Ketapang	10.560	8.157	8.180	4.179	9.804
7	Kab. Sintang	6.287	4.527	6.430	4.157	4.350
8	Kab. Kapuas Hulu	2.072	2.744	2.999	1.833	2.371
9	Kab. Sekadau	3.062	2.240	2.845	589	1.403
10	Kab. Melawi	1.785	1.266	2.921	2.835	3.860
11	Kab. Kayong Utara	2.692	1.974	1.261	3.231	2.150
12	Kab. Kubu Raya	17.220	14.713	11.468	13.808	20.656
13	Kota. Pontianak	22.438	20.316	18.183	13.106	15.313
14	Kota Singkawang	7.723	6.834	4.532	4.738	4.001
	Kalimantan Barat	111.684	101.620	86.623	76.010	86.343

Sumber : Sakernas, Badan Pusat Statistik(BPS) KALBAR

Kemudian kabupaten dengan jumlah pengangguran yang rendah terjadi di Kabupaten Melawi yaitu 1.785 jiwa-3.860 jiwa, Kabupaten Kayong Utara yaitu 2.692 jiwa-2.150 jiwa, Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 2.072 jiwa-2.371 jiwa, Kabupaten Sekadau yaitu 3.062 jiwa-1.403 jiwa, dan Kabupaten Bengkayang yaitu 3.961 jiwa-2.540 jiwa. Meskipun Tingkat Pengangguran yang tinggi namun dari tahun ketahun jumlah angka pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selalu mengalami penurunan ini tentunya menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun swasta sudah berupaya menurunkan tingkat pengangguran dengan membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Secara keseluruhan jumlah pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ketahunnya sudah mengalami penurunan namun cenderung fluktuasi. Dengan kondisi seperti ini diharapkan pemerintah pusat maupun daerah menyediakan lapangan kerja bagi setiap angkatan kerja agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu daerah pendanaan sangat diperlukan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dengan kondisi perekonomian yang baik diharapkan bisa meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja agar tidak terjadi pengangguran serta tercapainya kesejahteraan masyarakat, Akan tetapi tidak semua daerah bisa memenuhi kebutuhan daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan daerahnya. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerahnya secara mandiri agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah tentunya dengan memberikan anggaran berupa dana transfer salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan baik keuangan maupun pembangunan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Berikut Dana Alokasi Umum (DAU) Kabuapten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2013 :

Tabel 1.2

Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2009-2013 (Ribu Rupiah)

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab.Sambas	477.338.536	493.406.160	395.227.000	519.682.659	702.231.663
2	Kab.Bengkayang	288.987.740	295.931.543	340.561.423	399.692.985	457.245.355
3	Kab.Landak	346.888.010	358.090.492	403.287.163	477.731.189	534.166.873
4	Kab.Pontianak	185.529.469	313.155.439	350.018.667	410.336.243	463.983.726
5	Kab.Sanggau	441.911.490	444.197.737	502.204.125	589.206.205	674.049.502
6	Kab.Ketapang	591.888.390	608.067.401	670.698.985	898.337.135	898.337.135
7	Kab.Sintang	486.881.750	490.697.841	553.150.995	646.998.388	738.622.011
8	Kab.Kapuas Hulu	525.510.771	537.348.225	600.726.085	686.858.835	782.050.975
9	Kab.Sekadau	248.981.450	253.937.101	288.419.981	399.546.757	386.021.907
10	Kab.Melawi	290.645.380	288.933.942	331.816.366	468.104.101	468.104.101
11	Kab.Kayong Utara	211.798.620	218.278.970	254.559.596	303.211.589	370.981.961
12	Kab.Kubu Raya	375.546.940	414.760.167	460.516.762	535.464.386	627.894.391
13	Kota Pontianak	404.247.220	408.180.404	453.729.364	549.629.456	626.879.054
14	Kota Singkawang	262.355.020	269.526.606	309.175.562	373.908.313	431.527.888

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Barat (Kalbar Dalam Angka)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 menyatakan bahwa realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana kabupaten/kota dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar yaitu terjadi di Kabupaten Ketapang Rp. 591.888.390-Rp. 898.337.135, Kabupaten Kapuas Hulu Rp. 525.510.771-Rp. 782.050.975. Dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang selalu meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa ketergantungan anggaran masih tinggi dan kurang memanfaatkan sumber daya alam di daerah tersebut. Kemudian Kabupaten dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang kecil terjadi di Kabupaten Sekadau Rp.

248.981.450-Rp. 386.021.907, Kabupaten Kayong Utara Rp. 211.798.620-Rp. 370.981.961. dengan jumlah yang terbilang kecil dari kabupaten lainnya diharapkan pemerintah daerah bisa lebih tepat menggunakan Dana Alokasi (DAU) dalam membiayai pengeluaran daerahnya.

Secara keseluruhan kondisi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dalam Dana Aloksi Umum (DAU) tidak terdapat batasaan mengenai dalam menggunakan dana tersebut, sehingga daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang diinginkan. Namun, masalah yang timbul adalah kemampuan daerah dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU), Ketidakmampuan mengelola mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan daerah pada dana perimbangan. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya dilakukan dengan selektif agar dana yang didapat tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi publik. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dominan untuk belanja pegawai negeri sipil daerah yang berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, berkurangnya alokasi penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu sebaiknya pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dibuat seimbang dengan belanja lainnya yang sangat penting bagi daerah, namun tidak pula melupakan belanja pegawai yang merupakan keharusan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh daerah dengan dialokasikan untuk pelayan publik atau kepentingan pembangunan seperti infrastruktur atau layanan dasar (Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau

melakukan upaya penyerapan tenaga kerja di sentra-sentra lapangan kerja yang bisa mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam pembangunan ekonomi daerah perlu adanya pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran pemerintah salah satunya belanja modal yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayan publik agar kegiatan perekonomian di daerah bisa berjalan dengan baik serta dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan perkapita masyarakat. Belanja modal merupakan asset tetap pemerintah yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun meningkatkan kualitas pelayan publik, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pelayan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanja. Rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Setiap daerah dituntut memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan Belanja Modal daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 halaman 9 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal dalam periode 2009-2013 secara rata-rata terlihat bahwa Kabupaten Ketapang memiliki proporsi Alokasi Belanja Modal yang paling besar yaitu 12,19%, disusul oleh Kota Pontianak, dan Kabupaten Kapuas Hulu yang masing-masing 10,70% dan 10,24%. Sedangkan rata-rata belanja modal yang paling rendah terjadi pada Kabupaten Pontianak yaitu sebesar 4,36%. Berikut merupakan

data mengenai Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2009 – 2013 :

Tabel 1.3

**Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Periode 2009 - 2013 (Dalam Persen)**

NO	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Kab.Sambas	6,94	6,97	8,93	7,02	8,04	7,58
2	Kab.Bengkayang	6,80	3,46	9,08	3,93	9,44	6,54
3	Kab.Landak	8,65	8,24	6,11	7,92	8,61	7,9
4	Kab.Pontianak	5,09	4,87	5,30	5,19	4,36	4,96
5	Kab.Sanggau	4,80	5,62	5,81	8,39	7,19	6,36
6	Kab.Ketapang	15,48	10,64	12,65	12,04	10,15	12,19
7	Kab.Sintang	6,30	5,37	5,60	5,96	7,87	6,22
8	Kab.Kapuas Hulu	9,18	10,39	12,41	9,73	9,49	10,24
9	Kab.Sekadau	7,30	8,46	5,83	4,22	6,10	6,38
10	Kab.Melawi	8,38	5,61	5,66	6,97	5,81	6,48
11	Kab.Kayong Utara	6,62	7,02	5,85	5,39	5,59	6,09
12	Kab.Kubu Raya	5,48	8,05	9,53	8,16	8,22	7,88
13	Kota Pontianak	8,93	9,20	10,86	10,86	13,67	10,7
14	Kota Singkawang	8,08	6,09	5,33	4,17	6,57	6,04

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Barat (Kalbar Dalam Angka)

Pengalokasian anggaran Belanja Modal diharapkan bisa direalisasikan untuk kegiatan-kegiatan penunjang perekonomian disuatu daerah dengan demikian suatu daerah bisa lebih mandiri didalam menyelesaikan setiap persoalan sosial ekonomi mereka sesuai dengan amanat dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Dari setiap pengalokasian Belanja Modal diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik disuatu wilayah karena pada dasarnya Belanja Modal mengarah pada orientasi kepada publik (*public oriented*), tidak sama pada investasi swasta yang lebih cenderung pada mencari keuntungan (*profit oriented*). Adanya investasi swasta baik dalam maupun luar negeri, akan memperbesar kapasitas kegiatan

ekonomi disuatu negara ataupun daerah dan memperbesar kesempatan kerja sehingga dengan adanya investasi bisa menurunkan tingkat pengangguran. Maka dari itu dukungan dan peran dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dalam kemudahan dan kejelasan prosedur berinvestasi sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Berikut ini data mengenai realisasi Investasi Swasta Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2013:

Tabel 1.4

**Realisasi Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Periode 2009-2013 (Juta Rupiah)**

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab Sambas	56.076	228.797	269.815	466.433	666.559
2	Kab Bengkayang	39.814	117.472	118.353	381.804	382.150
3	Kab Landak	148.955	169.107	191.745	208.891	223.853
4	Kab Pontianak	1.052.971	1.214.669	1.276.354	1.222.461	1.660.611
5	Kab Sanggau	2.185.933	2.353.135	2.691.667	2.913.932	3.937.093
6	Kab Ketapang	1.414.969	2.023.436	2.702.825	3.440.213	4.044.272
7	Kab Sintang	1.577.382	1.645.183	1.709.257	1.842.424	2.091.661
8	Kab Kapuas Hulu	537.175	1.425.960	2.047.181	3.027.332	3.713.249
9	Kab Sekadau	37.040	37.092	41.309	125.251	591.499
10	Kab Melawi	4.485	4.485	4.485	43.750	43.749
11	Kab Kayong Utara	-	-	-	-	-
12	Kab Kubu Raya	7.130	67.758	122.567	914.968	1.900.738
13	Kota Pontianak	221.428	219.407	219.416	635.876	653.683
14	Kota Singkawang	-	-	-	22.495	54.776
	Kalimantan Barat	7.283.358	9.504.501	11.394.974	15.244.829	19.963.893

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Barat (Kalbar Dalam Angka)

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2013 jumlah investasi (PMDN dan PMA) terus mengalami peningkatan dan ada beberapa wilayah kabupaten dengan tingkat investasi yang tinggi dan cenderung meningkat diantara Kabupaten Ketapang yaitu Rp. 1.414.969-Rp 4.044.272, Kabupaten Sanggau Rp. 2.185.933-Rp. 3.937.093, Kabupaten Kapuas Hulu Rp. 537.175-3.713.249, Kabupaten Sintang Rp. 1.577.382-Rp. 2.091.661, Kabupaten Kubu Raya Rp. 7.130-Rp.1.900.738 dan yang terakhir Kabupaten Pontianak Rp. 1.052.971-Rp. 1.660.611. peningkatan investasi yang cukup signifikan ini diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi ekonomi yang lebih baik terutama di beberapa wilayah dengan tingkat investasi yang cukup besar, Karena diharapkan tingkat investasi tersebut mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Sedangkan beberapa kabupaten yang lainnya seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak dan Kota Singkawang dari setiap tahunnya tingkat investasi diwilayah tersebut terhitung sangat kecil dibandingkan Kabupaten-Kabupaten yang lainnnya terkecuali Kabupaten Kayong Utara dimana dari tahun 2009-2013 tidak ada investasi yang masuk di kabupaten tersebut sehingga ini sangat diperlukan peran pemerintah didalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi sehingga para investor bisa tertarik untuk berinvestasi di kabupaten tersebut terutama wilayah-wilayah yang tidak memiliki kualitas sumber daya alam yang cukup baik.

Dari penjelasan latar belakang diatas menunjukkan adanya indikasi hubungan antara Alokasi Dana Umum, Belanja Modal, dan Tingkat Investasi Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ **Analisis Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Tingkat Investasi, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Tingkat Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Apakah Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Tingkat Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
4. Apakah Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
5. Apakah Tingkat Investasi Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?
6. Apakah Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Tingkat Investasi, Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Alokasi Dana Umum Terhadap Tingkat Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
3. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Alokasi Dana Umum Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
4. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
5. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
6. Menguji dan Menganalisis Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Tingkat Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah,

memperkaya kajian-kajian empiris, dan memberikan informasi, serta sebagai referensi untuk penelitian lainnya.

- b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan informasi bagi pemerintah terkait, dalam Pengalokasikan Anggaran Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Tingkat Investasi sehingga dapat memberikan pengaruh yang optimal terhadap Tingkat Pengangguran, serta Memberikan insentif pada investor agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian suatu daerah guna untuk membantu pemerintah dalam menurunkan Tingkat Pengangguran.